

BAB I

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pada tahun 2011 yang lalu, Amerika Serikat mengeluarkan satu kebijakan berupa rencana untuk menghadirkan kembali kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik. Kebijakan ini tentunya ditanggapi beragam oleh berbagai negara di kawasan tersebut. Negara-negara sekutu Amerika Serikat tentunya sangat membuka tangan atas kehadiran militer Amerika Serikat, beda halnya dengan negara-negara non sekutu yang menganggap kehadiran militer Amerika Serikat dapat mengancam eksistensi negara masing-masing.

Alasan pemilihan judul skripsi ini, menurut penulis karena memiliki dampak yang luar bisa nantinya dalam kehidupan kita serta merupakan isu yang relatif baru yang penuh dengan kontroversi. Judul skripsi ini bisa memberikan kita persiapan untuk menghadapi kemungkinan besar terjadinya perang di tahun 2020 nanti dan gambaran tentang seberapa besar kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik, terutama sekali karena kita (Indonesia) berada di kawasan ini.

Pergeseran kekuatan militer Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik, menurut pendapat pengamat militer dan keamanan, Amerika Serikat akan menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai panggung perangnya di tahun 2020 nanti.¹

¹ "Connie: 8 Tahun Lagi, Perang Beralih ke Asia Pasifik" Sumber; <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=wawancara&i=36758-Connie:-8-Tahun-Lagi,-Perang-Beralih-ke-Asia-Pasifik-> Diakses; 16 Desember 2013

Yang namanya perang apapun bentuknya, menurut penulis pasti kita akan menolaknya. Karena lebih banyak kerugian yang dialami dari pada manfaat yang bisa kita ambil. Indonesia yang berada di kawasan ini sudah sepatutnya memperhitungkan kembali kekuatan militer yang dimilikinya. Karena menurut kaum realis perang itu terjadi ketika ada suatu negara yang mempunyai kekuatan militer yang relatif lebih lemah di banding dengan negara lainnya.

Dengan adanya fenomena diatas mengenai kebijakan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik, memberikan inspirasi bagi penulis untuk mempelajarinya lebih lanjut melalui penelitian yang berbentuk skripsi. Yang kemudian penulis mengambil judul "Kepentingan Amerika Serikat Menggeser Arah Kekuatan Militernya ke Kawasan Asia Pasifik".

B. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan alasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa tujuan dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan seberapa besar jumlah kekuatan militer Amerika Serikat yang akan digeser ke kawasan Asia Pasifik dan apa motif yang mendasari Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tersebut.
2. Mengaplikasikan teori-teori atau konsep-konsep yang penulis dapatkan

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara super power saat ini yang menghegemoni dunia terutama militernya. Negara yang menjadi pemenang dalam perang dingin ini mampu menunjukkan kedigdayaannya di dunia internasional. Tak dapat terelakkan lagi bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan dalam berbagai sektor baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, teknologi, militer, dan pemerintahan.

Militer Amerika memiliki sejumlah besar armada pesawat udara, sebelas kapal induk aktif Angkatan Laut, dan Unit Ekspedisi Marinir di laut dengan armada Angkatan Laut di Pasifik dan Atlantik. Militer Amerika Serikat juga mengoperasikan 702 pangkalan militer di luar negeri di 130 negara di tambah 6.000 pangkalan di wilayah Amerika Serikat sendiri, serta memfasilitasi keberadaan kurang lebih 1,4 juta personilnya yang tersebar di 25 negara asing.² Karena begitu meluasnya kehadiran personil militer Amerika Serikat di seluruh dunia, negara ini dianggap seolah-olah sedang membangun “kekaisaran militernya”.

Amerika Serikat yang mengaku sebagai sebagai polisinya dunia ikut ambil bagian dalam menangani masalah-masalah keamanan yang terjadi diberbagai penjuru

² “*Military Personnel*” Sumber; <https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/reports.do?category=reports&subCat=milActDutRes> Diakses 18 Desember 2012

dunia. Dari catatan sejarah telah membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang paling aktif dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia baik dengan misi diplomasinya atau dengan menggunakan kekuatan militernya.

Dalam pergaulan internasional sekarang ini setiap negara semakin memperkuat *power* nya untuk bisa menaklukkan atau mendominasi suatu negara bangsa atau kawasan tertentu. Dengan adanya peningkatan *power* ini membuat hubungan antar negara-negara semakin sensitif dan berkaitan. Hal ini dapat dilihat dimana isu-isu di suatu negara dapat menjadi isu di negara lain bahkan merambah ke isu regional dan juga global. Pengimplementasian tersebut dapat dilihat dimana kebijakan luar negeri suatu negara, seperti isu keamanan dapat mengancam keamanan negara lain, serta perdamaian dunia. Perjuangan suatu negara dalam menjaga kedaulatannya serta melindungi kepentingannya akan menjadi isu yang sensitif, tidak lain akan menyebabkan suatu persaingan karena setiap negara sibuk untuk menjaga keamanan negaranya masing-masing.

Dalam satu dekade terakhir, keinginan untuk melakukan kerjasama multilateral termasuk di bidang keamanan di antara negara-negara Asia Pasifik telah berkembang dengan pesat. Fenomena ini harus diakui telah dimotori oleh Negara-negara anggota ASEAN. Sekalipun Amerika Serikat memegang peran penting dalam

pembentukan *APEC meeting*, namun inisiatif lain seperti ARF, *ASEAN plus Three*, *East Asia Summit* semuanya disponsori oleh ASEAN.³

Berdasarkan doktrin pertahanan Amerika Serikat adalah pertahanan global, mencegah dan memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Amerika Serikat juga menjunjung tinggi superioritas militer dengan angkatan bersenjata yang sigap, fleksibel dan siap menghadapi ancaman dan kondisi darurat. Itulah yang membuat Amerika Serikat menjalin aliansi dengan banyak negara dan membangun pangkalan militer dimana-mana, termasuk di Australia Utara dimana Amerika Serikat akan menaruh korps marinirnya di Fort Robertson, Darwin. Amerika Serikat akan mulai menempatkan 250 orang marinirnya di Darwin dan jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 2.500 orang.⁴

Perjanjian jangka panjang penempatan kekuatan militer Amerika Serikat di Darwin dengan Australia ini merupakan gelar kekuatan di kawasan pasifik yang pertama kalinya sejak berakhirnya perang Vietnam. Motif keberadaan marinir Amerika Serikat di Fort Robertson, Darwin adalah untuk mewujudkan peningkatan kerjasama militer di antara Australia dan Amerika Serikat. Marinir itu dimaksudkan

³ Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 258-261

⁴ "Rencana Penempatan Militer AS di Darwin Ancam Perdamaian ASEAN." Sumber; <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/11/17/lus2i8- rencana penempatan-militer-as-di-darwin-ancam-perdamaian-ASEAN> Diakses; 18 Agustus 2013

menjadi gugus tugas reaksi cepat operasi non militer jika terjadi bencana alam di Australia dan kawasan sekitarnya.⁵

Memasuki tahun 2011 telah terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang kemudian diikuti dengan kebijakan strategi keamanan nasionalnya (*National Security Strategy*). Presiden Barrack Obama di awal tahun ini telah menegaskan bahwa Amerika telah kembali ke Asia Pasifik. Meskipun Amerika Serikat terlibat perang di Timur Tengah dan menyusutnya *budget* pertahanan Amerika Serikat yang berdampak pada pengurangan ribuan tentara tidak menyurutkan niat Amerika Serikat untuk menambah jumlah kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik. Ini terlihat dari jumlah penambahan pasukan Amerika Serikat di Australia.⁶

Sejak awal masa kepemimpinan Barack Obama telah melakukan berbagai pendekatan dengan negara aliansinya di Asia Pasifik melalui kunjungan maupun dialog kerjasama keamanan antar pemerintah khususnya di sub kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan negara-negara Asia cenderung menjadi *second front* dalam kerangka kebijakan militer luar negeri Amerika Serikat pasca

⁵ Ibid

⁶ "Obama akan "Rampingkan" Militer AS" Sumber; http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120106_obama.shtml Diakses: 22 Agustus 2013

terjadinya serangan 9 September (9/11) sehingga mempengaruhi posisi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.⁷

Upaya untuk memperkuat hubungan aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik sejalan dengan berlangsungnya demokratisasi di kawasan Timur Tengah. Berakhirnya perang Irak pada Agustus 2010 dan dimulainya proses transisi dalam pemerintahan Afghanistan di awal tahun 2011 menyebabkan Amerika Serikat menutup basis militer dan menarik mundur pasukannya secara bertahap dari wilayah negara tersebut. Pengurangan kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah semakin menguatkan indikasi perubahan strategi dalam kebijakan militer Amerika Serikat untuk mengalihkan fokus kebijakannya ke kawasan Asia Pasifik.⁸ Hal ini kemudian dipertegas oleh Barack Obama dalam pidato kunjungannya di Australia pada November 2011 bahwa kawasan Asia Pasifik akan menjadi prioritas dalam kebijakan militer Amerika Serikat.

Konsentrasi kekuatan militer Amerika Serikat kini telah beralih di sekitar wilayah Indonesia dan Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Atlantik dan Timur Tengah. Setelah mengakhiri perang di Iraq dan Afghanistan, Amerika Serikat menggeser fokus kepentingannya ke kawasan Asia Pasifik. Akibatnya lebih dari setengah kekuatan militer laut Amerika Serikat sekarang ditugaskan beroperasi di

⁷ "AS Fokuskan Sikap Politik ke Asia Pasifik" Sumber; <http://international.sindonews.com/read/2012/11/12/42/687754/as-fokuskan-sikap-politik-ke-asia-pasifik>. Diakses; 10 September 2013

⁸ "Gagal dengan Timur Tengah Baru, Kini AS Membidik Asia Pasifik" Sumber; <http://www.islamtimes.org/udcb0fb8fbb8an.aspx.html> Diakses; 1 September 2013

kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Amerika Serikat menilai pergeseran fokus keamanan ini sebagai “Perimbangan Kembali” (*Rebalance*) peran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Perimbangan ini bukan bermaksud bersifat konfrontatif, bukan hanya menyangkut masalah militer tapi juga kebijakan, diplomasi, investasi dan perdagangan. Perimbangan ini lebih kepada kolaborasi dan kerjasama.⁹

Dalam kunjungannya ke Australia terkait dengan penempatan marinir di Darwin, Barack Obama mengatakan bahwa prioritas utama pemerintahan Amerika Serikat adalah Asia Pasifik yang disampaikan dalam pidatonya di depan parlemen Australia bulan November 2011. Yang kemudian dipertegas dan dilaksanakan oleh menteri pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menempatkan 60% kekuatannya militernya di Asia Pasifik. Hingga tahun 2020 nanti terus menambah kekuatannya dari pembagian yang semula 50-50 persen antara Pasifik dan Atlantik akan menjadi 60-40 persen bagi masing-masing samudera.¹⁰

Pidato menteri pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta di pertemuan puncak Keamanan Asia di Singapura pada tanggal 2 Juni 2012.

“Di tahun 2020, Angkatan Laut Amerika Serikat akan menambah jumlah pasukannya dari hari ini dengan pembagian sekitar 50-50 persen antara

⁹ “Setelah Hancur di Timur Tengah AS Fokuskan ke Asia” Sumber; <http://www.islamtimes.org/vdcdnj0fzyt0xf6.lp2y.html> Diakses; 1 September 2013

¹⁰ “Amerika Kerahkan Armada Tempurnya ke Laut China Selatan” Sumber; <http://lirisnews.com/internasional/asia/16220/amerika-kerahkan-armada-tempurnya-ke-laut-china-selatan>

Pasifik dan Atlantik menjadi 60-40 persen antara kedua samudera itu,..... Ini akan mencakup enam pesawat pengangkut di wilayah ini, sebagian besar kapal penghancur, kapal perang, dan kapal selam...”¹¹

Untuk mencapai angka 60 persen dari total kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020 mendatang, Amerika Serikat akan melakukan sejumlah pergeseran kekuatan militer meliputi personil, alat kelengkapan militernya dan pangkalan militer. Pertama; pergeseran pangkalan militer sebanyak 3.600 dari 6.000 yang tersebar di dunia saat ini. Kedua; pergeseran 840.000 personal militer dari total 1,4 juta personal militer yang di miliki Amerika Serikat saat ini. Ketiga; pergeseran sebanyak 1.095 personal militer dari 1.824 personal militer Amerika Serikat di Eropa dan NATO. Keempat; pergeseran 68.809 personal militer dari 114.682 personal militer Amerika Serikat di Afrika. Kelima; pergeseran 2.564 personal militer dari 4.274 personal militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Asia. Pergeseran personal militer dari kesemuanya untuk menambah kekuatan 89.846 personal militer Amerika Serikat yang sudah ada saat ini di Asia Pasifik.¹²

Penambahan persentase kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik menjadi 60% di tahun 2020 nanti membuat kita bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya yang terdapat di kawasan ini sehingga Amerika Serikat mengeluarkan

¹¹ “AS Akan Tambah Armada di Asia Pasifik.” Sumber; <http://internasional.kompas.com/read/2012/06/02/16170333/as-akan-tambah-armada-di-asia-pasifik> Diakses; 27 Agustus 2013

¹² “Connie Rahakundini Bakrie: Indonesia Diantara Globalisasi dan Intervensi Militer” Sumber; <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=wawancara&i=35195-Connie-Rahakundini-Bakrie-Indonesia-Diantara-Globalisasi-dan-Intervensi-Militer> Diakses; 16

kebijakan yang penuh kontroversi ini. Di pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengapa kebijakan itu dikeluarkan.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu "Mengapa Amerika Serikat menggeser fokus kekuatan militernya dari kawasan Atlantik ke kawasan Asia Pasifik mulai tahun 2011?".

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam perspektif Realis, tujuan nasional dalam kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh perilaku internasional, seperti keamanan, kapabilitas militer, aliansi negara dan *balance of power*.¹³ Doktrin keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara merupakan nilai-nilai yang menggerakkan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri dan merupakan petunjuk dasar kebijakan luar negeri yang bertanggung jawab. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya harus menekankan etika kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam dunia internasional yang penuh dengan perbedaan, yang pilihan-pilihan luar negerinya terbatas dan dalam menghadapi bahaya yang selalu muncul tiba-tiba seperti juga kesempatan atau dalam pelaksanaannya merupakan

¹³ Hans J. Morgenthau & Kenneth Thompson, *Politics Among Nations*, 6th ed. New York:

aktivitas instrumental berdasarkan kalkulasi cerdas kekuatan dan kepentingan suatu negara terhadap kekuatan dan kepentingan musuh dan pesaing.¹⁴

Defenisi kebijakan luar negeri menurut Kalevi J. Holsti, adalah;

*Gagasan atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan, pada perilaku sebuah atau beberapa aktor negara lain maupun non negara; ataupun juga mengubah atau mempertahankan sebuah objek, kondisi atau praktik di lingkungan eksternal.*¹⁵

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹⁶ Setiap negara yang memiliki kepentingan nasional harus memiliki tujuan yang jelas maka pemerintah harus menyesuaikan setiap strategi secara hati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang diambil, negara harus mengontrol dan mengendalikan setiap hasil yang terbentuk dari kebijakan itu dengan kata lain harus ada penyesuaian dalam interaksinya.

Realis dan kebanyakan pembuat kebijakan luar negeri memulai dengan *rational model* dimana kebijakan luar negeri yang dipahami sebagai tindakan yang

¹⁴ Robert Jackson & Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Tej. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 93

¹⁵ Kalevi J. Holsti. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall International. hal. 271

¹⁶ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal. 49

dipilih oleh pemerintah nasional yang memaksimalkan tujuan strategis dan tujuan objektif. Negara diasumsikan menjadi aktor kesatuan dengan tujuan yang ditetapkan satu set pilihan. Dalam *rational model* dari pembuatan kebijakan, negara yang merupakan aktor harus mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi secara jelas kemudian memaparkan beberapa pilihan kebijakan dengan menganalisa keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari beberapa pilihan kebijakan yang akan diambil kemudian memilih aksi yang menghasilkan pencapaian kepentingan yang paling tinggi dengan kerugian yang kurang.

Membahas *rational model* sangat kompleks jika dihubungkan dengan pendekatan *strategic choice*. Pendekatan *strategic choice* merupakan bagian dari literatur *rational model* yang telah berkembang di ilmu politik. Seperti analisis *rational model* lainnya, pendekatan *strategic choice* menganggap bahwa aktor membuat Pilihan purposif atau disengaja, bahwa mereka mengsurvei lingkungan objek dan, untuk yang terbaik dari kemampuan mereka, memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Pendekatan ini tidak menganggap bahwa aktor selalu memperoleh tujuan mereka yang paling diinginkan.¹⁷

Dalam hubungan internasional negara merupakan aktor utama dalam politik dunia. Inti terpenting dalam kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Tetapi negara-negara

¹⁷ David A. Lake da Robert Powell. 1999. *Strategic Choice and International Relations*, New Jersey: Princeton University Press Hal. 6

tidaklah sama sebaliknya, terdapat hirarki internasional terhadap kekuasaan diantara negara-negara. Negara-negara yang paling penting dalam politik dunia adalah negara-negara berkekuatan besar.¹⁸ Semua kebijakan luar negeri yang dibentuk dari satu hal yaitu kepentingan negara, dan kepentingan negara inilah yang memusatkan negara sebagai objek kebijakan luar negeri yang menjadi kapabilitas suatu negara dalam menjalankan kebijakannya.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam hubungan internasional telah memunculkan berbagai isu-isu, baik dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga militer. Hal ini tidak lain untuk tetap menjaga eksistensi dirinya dengan *tangible* maupun *intangible powers* yang dimilikinya demi mencapai dan memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional.¹⁹ David N. Farnsworth mendefinisikan perbedaan antara *tangible* dan *intangible powers*, dimana dalam hal ini bagi pandangan ini bahwa:

*unsur-unsur yang bersifat tangible adalah unsur-unsur yang terdiri atas, penduduk, geografis, sumber-sumber daya alam, kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Sedangkan untuk unsur-unsur yang berkategori sebagai yang bersifat intangible terdiri dari unsur-unsur seperti, national morale, nation leadership dan sistem politik.*²⁰

¹⁸ Robert Jackson & George Sorensen. *op cit.* hal 89

¹⁹ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. *op cit.* hal. 41.

²⁰ P. Anthonius Sitany. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan agar tujuan nasional suatu negara dapat tercapai dengan tetap mempertahankan *power* bahkan lebih dari itu. *Power* adalah alat yang digunakan suatu negara semata-mata untuk mengontrol negara lain dalam menjalin hubungan internasional. Jadi dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah:

*tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.*²¹

Adanya kepentingan nasional serta *power* yang dimiliki suatu negara, maka negara akan merefleksikannya ke dalam kebijakan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri suatu negara. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi atau aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara.²² Politik luar negeri inilah yang nantinya menjadi dasar suatu negara untuk melakukan aktifitasnya dengan negara lain dalam hubungan internasional. Politik internasional digambarkan sebagai yang paling utama politik kekuasaan (*powers politics*); suatu arena persaingan, konflik dan perang antar negara-negara dimana masalah-masalah

²¹ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani *loc cit.*, hal 35.

²² P. Anthonius Sitepu, *op cit.* hal. 178.

dasar yang sama dalam mempertahankan kepentingan nasional dan dalam menjamin kelangsungan hidup negara berulang sendiri terus-menerus.²³

3. Konsep Balance of Power

Banyak arti mengenai *Balance of Power*, beberapa penulis menggunakan teori *Balance of Power* untuk merujuk pada distribusi sumber kekuatan. Disini definisi *Balance of Power* sebagai distribusi. Perimbangan kekuatan berarti suatu distribusi sumberdaya yang relatif seimbang diantara partisipan. Selain itu penafsiran lainnya mengenai *Balance of Power* yaitu sebagai ekuilibrium. Ekuilibrium dipandang sebagai suatu hubungan di antara variabel-variabel utama sistem itu (seperti distribusi sumberdaya atau sikap dan kebijaksanaan negara-negara), yang begitu erat sehingga perubahan disuatu variabel pasti akan menimbulkan perubahan di variabel lainnya.

Pendekatan ini berasumsi bahwa selama masih ada distribusi sumberdaya yang cukup seimbang diantara lima atau lebih aktor, kebijaksanaan mereka akan tetap moderat, dan upaya oleh satu aktor untuk memperoleh posisi hegemoni akan bisa digagalkan oleh kekuatan pengimbangannya.²⁴ Inti dari beberapa pendekatan mengenai *Balance of Power* ini yaitu pendiskripsian bahwa apabila sebuah negara merasa terancam oleh peningkatan kekuatan satu negara lain, maka negara yang

²³ Robert Jackson & Georg Sorensen. *loc cit*, hal 88.

²⁴ Raymond F. Hopkins & Richard W. Mansbach. 1973. *Structure and Process in International Politics*. Harper and Row: hal 27.

merasa terancam akan berkoalisi dengan negara lain untuk menyeimbangkan kekuatan.²⁵

Balance of power bukan hanya konsepsi empiris tentang cara politik dunia dijalankan. *Balance of power* juga merupakan nilai dasar: merupakan tujuan yang sah dan petunjuk bagi ketatanegaraan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari pemimpin negara-negara berkekuatan besar. Dengan kata lain, bagi kaum realis klasik *balance of power* adalah:

*institusi yang diinginkan dan sesuatu yang baik sesuatu untuk diperjuangkan sebab ia mencegah terjadinya penguasaan dunia yang hegemonik oleh negara-negara berkekuatan besar. Sistem ini menjunjung tinggi nilai-nilai dasar keamanan dan perdamaian internasional.*²⁶

Kaum realis sangat menekankan pentingnya *balance of power* baik yang merupakan konsep empiris yang hirau dengan cara politik dunia terlihat berjalan maupun konsep normatif: hal ini merupakan tujuan yang sah dan suatu petunjuk bagi ketatanegaraan yang bertanggung jawab pada bagian pemimpin negara-negara besar. Menegakkan nilai-nilai dasar perdamaian dan keamanan.

Dalam kajian hubungan internasional, isu-isu *high politics* sudah tidak asing lagi. Isu-isu yang sangat kental dengan militer dan keamanan tersebut sudah lama muncul. Ilmuwan Hubungan Internasional pun sependapat kalau isu ini akan terus

²⁵ Harwanto Dahlan. 2008. *Analisis Hubungan Internasional*. hal.40

²⁶ Robert Jackson & Georg Sorenson. *loc cit* hal. 105

muncul di dunia internasional jikalau ada negara yang mengalami konflik hingga peperangan.

Militer di sini menjadi sangat bermakna kalau dilihat dari perspektif hubungan internasional. Militer dapat diartikan sebagai seperangkat aparaturnegara yang berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta daerah yuridiksi suatu bangsa dan negara. Munculnya China dengan kekuatan militer barunya menjadikan negara ini menjadi salah satu negara yang berani mengeluarkan anggaran militer tertinggi setelah Amerika Serikat.²⁷ Kekuatan besar yang diprediksi akan mempengaruhi stabilitas keamanan dunia ini sangat berpotensi menimbulkan konflik jika salah satu pihak menuding yang macam-macam baik dari pihak China kepada Amerika Serikat maupun sebaliknya.

Teori *Balance of Power* dapat mendeskripsikan suatu kondisi seperti itu. Dalam teori ini, munculnya dua kubu yang berbeda aliran serta aliansi menjadi tolak ukur stabilitas keamanan dunia. Teori ini berpendapat bahwa adanya kekuatan suatu negara karena negara tersebut memiliki militer yang sangat kuat sehingga negara tersebut tidak segan untuk tampil di dunia internasional sebagai negara *super power*. Akan tetapi di belahan bumi lainnya, muncul juga negara dengan kekuatan militer yang tidak dapat dianggap remeh yang didukung oleh kemajuan ekonomi yang

²⁷ "10 Negara dengan Biaya Perang Terbesar " Sumber; <http://bisnis.liputan6.com/read/633848/10-negara-dengan-biaya-perang-terbesar>. Diakses; 23 Agustus 2013

sangat pesat. Biasanya dua kubu yang berseberangan ini akan membentuk aliansi yang berguna untuk mendukung masing-masing negara dalam kancah internasional.

4. Konsep Deterrence

Konsep ini secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah cara yang dilakukan negara dalam mengambil tindakan atau aksi mereka dalam usahanya mempertahankan keamanan nasional negaranya yang merasa terancam. Dalam penelitian ini, konsep *deterrence* berhubungan dengan sikap Amerika Serikat yang ingin menambah kekuatannya untuk mengimbangi kebangkitan kekuatan militer China dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam kamus hubungan internasional karya Jack C. Plano dan Roy Olton *deterrence* dijabarkan sebagai:²⁸

Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah atau sekelompok negara untuk mencegah negara lain menjalankan kebijaksanaan yang tidak dikehendaki. Deterrence mencakup strategi ancaman hukuman atau penolakan untuk mempercayai pihak lain karena resiko tindakan antisipasi akan tidak terkirakan.

Sarana yang dipergunakan untuk menjalankan kebijaksanaan *deterrence* termasuk peningkatan kapabilitas secara umum, mengembangkan persenjataan super dengan daya hancur massal, membentuk aliansi dan ancaman melakukan tindakan balasan. Agar menjadi efektif ancaman *deterrence* harus benar-benar dapat dipercaya oleh pihak lain yang dijadikan sasaran.

Menurut Steven Spiegel terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah negara agar *deterrence*-nya untuk berhasil. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka penangkalan atau *deterrence* yang dilakukan oleh suatu negara tidak akan mencapai hasil yang maksimal, diantaranya adalah:²⁹ *Pertama*, sebuah negara yang akan melakukan strategi penangkalan ini harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan usahanya untuk mempertahankan eksistensi negaranya (*commitment*). Negara yang bersangkutan harus secara nyata dan tegas dalam menunjukkan kepada negara lain yang dituju bahwa ia sungguh-sungguh dalam melindungi negaranya dari ancaman asing.

Kedua, jika sebuah negara sudah memiliki komitmen yang kuat dalam upayanya melakukan strategi penangkalan atau *deterrence*, maka hal tersebut haruslah didukung dengan pengadaan fasilitas-fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga dapat memudahkan negara yang bersangkutan untuk melancarkan strategi *deterrencenya*. Apabila negara yang ingin melakukan penangkalan dalam usaha melindungi negaranya dari ancaman asing tidak dapat memenuhi kapabilitas yang diperlukan, maka akan sedikit sekali kemungkinan *deterrencenya* akan berhasil. Persyaratan ini disebut aspek kapabilitas (*capability*).

Ketiga adalah penentu bagi sebuah negara jika persyaratan pertama dan kedua telah dipenuhi. Persyaratan ini mencakup kemampuan sebuah negara dalam

²⁹ Steven Spiegel, 2002, *Worlds Politics in New Era United States*; Thomson Wadsworth

menjalankan komitmennya dengan didukung oleh segala fasilitas dan sarana-sarana lainnya. Apabila negara yang ingin melakukan *deterrence* telah memenuhi aspek-aspek pertama dan kedua, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan keduanya secara baik, maka *deterrence* tersebut tidak akan berhasil, maka negara yang bersangkutan akan gagal dalam upayanya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa ia memiliki strategi bertahan yang sangat baik. Secara tidak langsung hal ini akan memicu negara yang lebih besar atau kuat untuk melakukan agresi sewaktu-waktu.

Namun, bila sebuah negara belum memiliki persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya untuk melakukan *deterrence*, maka negara tersebut dapat melakukan cara lain yang disebut *Nuclear Deterrence*. *Nuclear Deterrence* adalah sebuah cara yang dilakukan oleh Korea Utara dengan memilih nuklir sebagai alat melaksanakan upaya *deterrence* mereka .

Meskipun demikian, Colin S. Gray, dalam bukunya *Nuclear Strategy and National Style* mengatakan bahwa dalam melakukan sebuah tindakan *deterrence*, terutama yang menggunakan nuklir sebagai alatnya untuk tidak sekedar menjadikan kepemilikan nuklirnya sebagai sebuah gertakan biasa. Negara pemilik nuklir tersebut harus mampu menunjukkan kepada negara lain bahwa mereka tidak hanya memiliki

nuklir, tapi juga siap untuk menggunakannya dengan segala resiko yang akan ditanggungnya.³⁰

Dalam konsep *deterrence* ini, diperlukan sebuah kondisi dimana negara yang dituju merasakan adanya ancaman atau teror oleh negara yang sedang melakukan *deterrence*, sehingga membuat negara yang dituju akan berada pada situasi *insecure*, dan akan berdampak pada timbulnya *security dilemma*. Situasi ini dinamakan dengan perimbangan teror (*balance of terror*).

F. HIPOTESA

Kepentingan Amerika Serikat menggeser fokus kekuatan militernya dari kawasan Atlantik dan Timur Tengah ke kawasan Asia Pasifik adalah karena *Pertama*, faktor ekonomi politik, Amerika Serikat berusaha mengamankan kepentingan ekonominya yang berada di kawasan Asia Pasifik, suatu kawasan yang sedang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. *Kedua*, faktor politik pertahanan dan keamanan, Amerika Serikat ingin menyeimbangkan kekuatan militer para sekutu-sekutunya di Asia Pasifik atas kekuatan militer China yang sedang bangkit dengan pesat.

³⁰ Colin S. Gray, 1986. *Nuclear Strategy and National Style*. London: Hamilton Press, hal.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Sebagai usaha agar penulisan skripsi ini tetap fokus terhadap tema yang telah ditetapkan maka pembatasan masalah sangatlah penting untuk dilakukan. Pembatasan masalah yang dilakukan diharapkan dapat mempersempit area penulisan, sehingga penulis dapat tetap fokus dengan masalah yang diteliti pada skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membatasi pada pembahasan mengenai pergeseran arah kekuatan militer Amerika Serikat dari Samudera Atlantik ke kawasan Asia Pasifik.

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan batasan penulisan. Oleh karena itu penulis hanya membatasi jangkauan penelitian pada bidang kajian tentang alasan-alasan yang mendasari mengapa Amerika Serikat menggeser arah kekuatannya dari kawasan Atlantik ke kawasan Asia Pasifik.

H. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, dalam hal ini mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam mengubah fokus kebijakan kekuatannya ke kawasan

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini di peroleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan masalah. Data yang diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal internet dan tulisan-tulisan lainnyayang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, untuk lebih mudah memahaminya penulis membedah skripsi ini kedalam lima bab yang masing-masing bab membahas hal-hal yang berbeda-beda.

Bab I akan menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual yang berisi tentang penjelasan konsep kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep *balance of power* dan konsep *deterrence*, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan tentang kebijakan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dan di kawasan Atlantik sebelum tahun 2010. Di bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan militer Amerika Serikat terhadap Perang Dunia, NATO dan kerjasama militer Amerika Serikat di Asia Pasifik.

Bab III akan menjelaskan tentang rencana pergeseran kekuatan militer Amerika Serikat dari kawasan Atlantik ke kawasan Asia Pasifik setelah tahun 2010. Kerjasama militer Amerika Serikat dengan beberapa negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Pasifik dan Asia Selatan.

Bab IV akan menjelaskan tentang alasan-alasan Amerika Serikat menggeser kekuatan militernya dari kawasan Atlantik ke kawasan Asia Pasifik. Di bab ini akan dijelaskan mengenai alasan secara ekonomi politik yaitu menyangkut masalah kepentingan-kepentingan ekonomi Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan ini. Dan alasan yang kedua secara politik pertahanan dan keamanan yaitu usaha Amerika Serikat untuk membendung pengaruh kebangkitan kekuatan militer China di kawasan ini. Bab V akan menyajikan kesimpulan dari semua tulisan ini.